

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Jakarta Timur

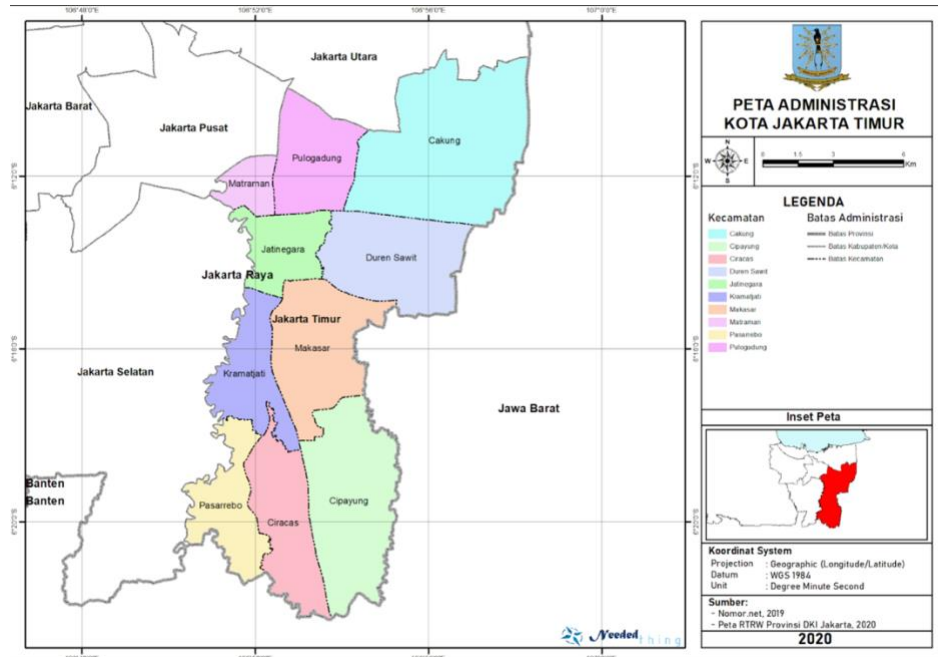
Pada gambaran umum dijelaskan tentang informasi-informasi terkait dengan penelitian Analisis Pengembangan Komunitas dalam Program Intervensi Berbasis Masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Jakarta Timur. Gambaran Umum mengenai penelitian ini memuat keterangan-keterangan mengenai luas dan wilayah administrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, letak dan kondisi geografis Jakarta Timur, kondisi demografis Kota Administrasi Jakarta Timur, visi dan misi BNN Kota Administrasi Jakarta Timur, Tugas pokok serta fungsi, struktur organisasi, kegiatan yang dilaksanakan oleh agen pemulihan dan komunitas-komunitas yang terlibat dalam program IBM.

2.1.1 Luas dan Wilayah Administrasi

Kota Jakarta Timur secara geografis memiliki luas wilayah sebesar 187,75 km², yang berkontribusi 28,37% dari total luas Provinsi DKI Jakarta. Pusat pemerintahan terletak di Cakung. Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi secara administratif menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan, yaitu Kecamatan Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung, Makasar, Kramatjati, Jatinegara, Duren Sawit, Cakung, Pulogadung, dan Matraman. Dari beberapa kecamatan tersebut, Jakarta Timur memiliki batas-batas wilayah yang jelas. Di sebelah utara, batasnya berbatasan dengan Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Pusat. Batas di sebelah timur adalah Kota Bekasi (Provinsi Jawa Barat). Di selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi

Jawa Barat), dan di sebelah barat, berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berikut merupakan gambaran peta Jakarta Timur:

Gambar 2. 1 Peta Kota Administrasi Jakarta Timur



Sumber : neededthing.blogspot.com

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Jakarta Timur adalah bagian dari Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang terletak di bagian timur Jakarta. Letak geografis Jakarta Timur berada antara 106° hingga 49° Bujur Timur dan 06° hingga 10° Lintang Selatan. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kota Administrasi Jakarta Timur, luas wilayahnya adalah 188,03 km² dan memiliki 2 sungai serta diperkirakan ada sekitar 50-100 kanal yang digunakan sebagai sumber air, perikanan, dan bisnis urban. Jakarta Timur merupakan daerah dataran rendah yang terletak sekitar 8 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini merupakan bagian dari ibukota Jakarta yang memiliki kriteria khusus sebagai kota tua dan kota metropolitan yang megah.

2.1.3 Kondisi Demografis Kota Jakarta Timur

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.315.114 jiwa pada tahun 2022. Sementara itu, angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan pada tahun yang sama yakni sebesar 99,86 yang berarti ada 100 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk wanita. Pada tahun yang sama Kota Jakarta Timur memiliki kepadatan penduduk mencapai 17.419 jiwa/km². Di bawah ini merupakan tabel penduduk di setiap kecamatan, Kota Jakarta Timur.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Per-Kecamatan, di Kota Jakarta Timur 2022

Kecamatan	Penduduk
	2022
Pasar Rebo	242.073 Jiwa
Ciracas	327.849 Jiwa
Cipayung	308.528 Jiwa
Makasar	228.504 Jiwa
Kramat Jati	325.440 Jiwa
Jatinegara	329.481 Jiwa
Duren Sawit	457.241 Jiwa
Cakung	596.306 Jiwa
Pulogadung	309.169 Jiwa
Matraman	190.523 Jiwa

Sumber : BPS Kota Jakarta Timur 2022

2.2 Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Jakarta Timur

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Timur beroperasi di bawah Badan Narkotika Nasional DKI Jakarta dan memiliki tugas utama untuk melaksanakan pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyalahgunaan serta peredaran narkoba di wilayah Jakarta Timur. BNN Kota Jakarta Timur dipimpin oleh Kepala Badan Narkotika Nasional. Kantornya berlokasi di Jalan Dr. Sumarno, RT.3/RW.8, Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13950.

2.2.1 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Timur

Setiap lembaga atau organisasi pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk Visi dan beberapa Misi. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Timur juga memiliki Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Strategisnya. Visi BNN Kota Jakarta Timur adalah "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba."

Misi BNN Kota Jakarta Timur meliputi: pertama, mewujudkan kualitas hidup yang tinggi, maju, dan mandiri bagi masyarakat Kota Jakarta Timur; kedua, mempercepat upaya menuju Indonesia bebas narkoba.

2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Timur

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur merupakan instansi vertikal dari Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai berikut:

Tugas:

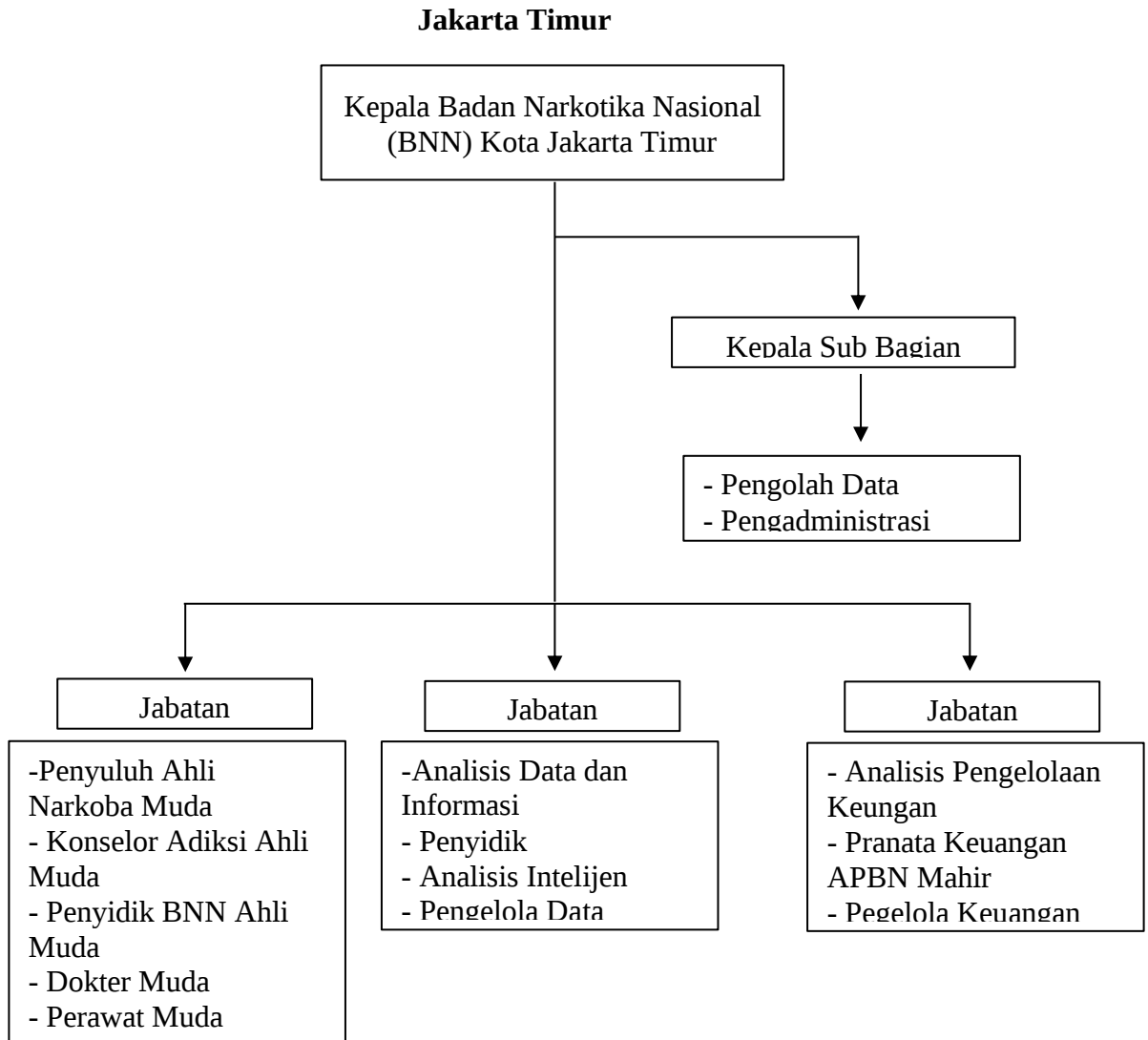
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.
3. Berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat serta memantau dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
6. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik di tingkat regional maupun internasional, untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba.
7. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

8. Menyusun laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Fungsi:

1. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di seksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol, yang selanjutnya disebut P4GN di wilayah Kota Jakarta Timur.
2. Melaksanakan kebijakan teknis di seksi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan di Kota Jakarta Timur.
3. Melaksanakan layanan hukum dan kerja sama di wilayah Kota Jakarta Timur.
4. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di wilayah Kota Jakarta Timur.
5. Melaksanakan administrasi BNN Kota Jakarta Timur.
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan untuk BNN Kota Jakarta Timur.

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota



Sumber: BNN Jakarta Timur

2.3 Gambaran Umum Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

Pelaksanaan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) bertujuan untuk mengatasi tantangan penyalahgunaan narkoba yang dihadapi oleh masyarakat di perkotaan maupun pedesaan melalui layanan penanganan dini. IBM dirancang untuk mengelola risiko penggunaan narkoba yang ringan atau yang memerlukan layanan tambahan. Bagi individu dengan risiko sedang hingga berat, rujukan dapat dilakukan ke lembaga rehabilitasi atau fasilitas kesehatan. Dengan demikian, IBM

berperan sebagai penanganan utama yang paling dekat dengan masyarakat, berinteraksi langsung dengan pengguna narkoba, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Keterlibatan langsung ini meningkatkan efektivitas intervensi, karena pengguna narkoba dan keluarganya tidak perlu pergi ke tempat lain, yang bisa menjadi penghalang.

Untuk memulai program IBM di desa atau kelurahan, diperlukan komitmen bersama yang disepakati mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, yang mencakup:

1. Kesetaraan

Prinsip ini merupakan landasan utama yang harus dipegang oleh anggota masyarakat, dengan menekankan kesetaraan atau posisi yang setara antara anggota masyarakat dan pengguna narkoba sebagai klien. Dinamika yang dibangun hendaknya menciptakan hubungan yang setara dengan mengembangkan mekanisme untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan.

2. Partisipasi

IBM merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan narkoba. Program ini dikembangkan, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat. Setiap keputusan terkait kegiatan yang akan dilakukan oleh IBM melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat, sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi respons terhadap kebutuhan yang nyata. Namun, untuk mencapai hal ini, dibutuhkan waktu serta proses pendampingan yang melibatkan BNNP/BNNK sebagai fasilitator yang berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat.

3. Keswadayaan

Prinsip keswadayaan menekankan penghargaan terhadap kemampuan masyarakat. Masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendalam mengenai situasi dan kondisi di sekitarnya, serta memiliki sumber daya dan kemauan, di samping norma-norma sosial yang telah ada. Dalam bingkai prinsip ini, bantuan dari pihak luar dianggap sebagai dukungan.

4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan harus dirancang agar dapat berkelanjutan dan memerlukan komitmen serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Meskipun pada awalnya, peran fasilitator lebih dominan dibandingkan masyarakat, seiring berjalannya waktu, peran fasilitator akan berkurang dan akhirnya lenyap ketika masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan mereka secara mandiri.

2.4 Gambaran Umum Agen Pemulihan (AP)

Agen Pemulihan (AP) adalah individu yang berasal dari masyarakat dan berdomisili di Desa atau Kelurahan, yang ditunjuk oleh Kepala Desa atau Lurah untuk menjalankan kegiatan serta layanan yang berbasis intervensi masyarakat. Mereka telah menerima pelatihan sebagai mitra Badan Narkotika Nasional. Jenis layanan dan intensitasnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta sumber daya yang ada.

Tugas utama Agen Pemulihan adalah melaksanakan berbagai kegiatan dan layanan IBM. Berikut adalah rincian tugas AP:

1. Melakukan pemetaan mengenai situasi dan kondisi penyalahgunaan narkoba di area IBM yang telah ditentukan sesuai dengan tempat tinggalnya.

2. Mengadakan penjangkauan kepada penyalahguna narkoba serta mengidentifikasi pola penggunaan dan tingkat permasalahan yang ada.
3. Menyelenggarakan kegiatan dan layanan IBM yang terdiri dari layanan wajib dan pilihan, baik untuk individu maupun kelompok, sesuai dengan kebutuhan klien.
4. Memberikan dukungan pemulihan melalui program bina lanjut dan penanganan kekambuhan bagi pengguna narkoba.
5. Merujuk penyalahguna narkoba ke layanan kesehatan dan sosial yang diperlukan, dengan koordinasi bersama BNNP/BNNK.
6. Melibatkan mantan penyalahguna narkoba serta masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pengguna narkoba di lingkungan mereka.